

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa wisata oleh pemerintah sejalan dengan tujuan peningkatan sektor kepariwisataan yaitu untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan melestarikan alam, sumber daya serta potensi lokal yang ada. Dilihat dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Pariwisata yang membahas tentang pemerintah yang mulai menggalakkan program nasional berupa pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata (Susanawati, 2019: 121).

Dalam pengembangan desa wisata, terdapat beberapa permasalahan dan salah satu permasalahan yang umumnya terjadi adalah kurang optimalnya partisipasi dan peran masyarakat. Penyelenggaraan dan pembangunan desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 (12) yang ditunjukan melalui pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian serta mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan terhadap pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan, serta berupaya memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun, program

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sering kali menggunakan pendekatan *top-down* sehingga program-program yang dilakukan hanya tampak seperti proyek semata tanpa ada keterlibatan dari pihak masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat hanya terlibat secara insidental dan tidak memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program tersebut. Sehingga partisipasi masyarakat yang menjadi tujuan utama dari program pemberdayaan masyarakat belum menunjukkan hasil secara maksimal. Hal yang dapat terjadi dari kurangnya partisipasi masyarakat adalah minimnya rasa bangga terhadap pariwisata yang ada di wilayah mereka dan juga masyarakat tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan pariwisata yang ada di desa (Herdiana, 2019). Menurut Dewi (2013) menjelaskan bahwa proses pengembangan desa wisata sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal dalam seluruh tahapnya, baik dari perencanaan, implementasi, serta pengawasan. Namun, dalam realitasnya seringkali partisipasi dari masyarakat diabaikan.

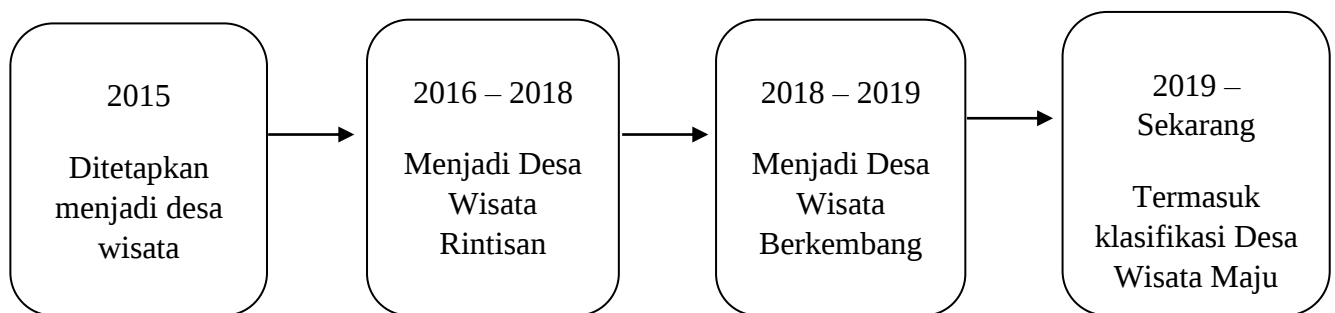
Penelitian yang dilakukan oleh Naibaho, dkk (2023) mengatakan bahwa terdapat kendala ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat di Desa Wisata Kandri diantaranya terkait dengan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat. Masyarakat masih berada dalam pola pikir yang cenderung masih rendah dan primitif (Isnaningtyas & Marlina, 2017). Hal ini membuat peran masyarakat dalam pengoptimalan desa wisata menjadi tidak maksimal. Padahal dalam pengembangan desa wisata sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat lokal dalam seluruh tahapnya.

Penelitian tentang desa wisata memang sudah marak dilakukan, tetapi dalam pengembangan desa wisata terdapat desa yang tergolong sebagai desa wisata berhasil dan tidak berhasil. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah desa wisata yang terus bertambah di tiap tahunnya dengan jumlah desa wisata sebanyak 818 desa (per tahun 2022) yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Sejak 2022, Kabupaten Semarang memiliki 85 desa wisata dan hal ini termasuk pencapaian terbanyak desa wisata dalam satu kabupaten di Indonesia. Desa wisata yang ada di Kabupaten Semarang ini menjadi jumlah yang paling banyak se-Jawa Tengah dengan mencapai sekitar 11% dari jumlah keseluruhan yang mencapai 818 desa wisata. Salah satu dari 85 desa wisata di Kabupaten Semarang adalah Desa Wisata Lerep yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat. Desa Wisata Lerep dapat dikategorikan sebagai desa wisata yang berhasil, hal ini dapat dilihat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Nomor 556/381/2022 tentang Klasifikasi Desa Wisata di Kabupaten Semarang, yang menggolongkan Desa Lerep untuk masuk ke dalam salah satu desa wisata maju dari dua desa di Kabupaten Semarang. Lalu pencapaian lain yang diperoleh Desa Lerep dapat dilihat dari penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang menetapkan Desa Wisata Lerep sebagai salah satu Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia. Penghargaan ini merupakan salah satu dari banyak penghargaan yang telah diterima oleh Desa Lerep yang dulunya hanya sebuah desa miskin dan tertinggal. Penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan ini diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai upaya untuk meningkatkan *quality tourism*. Menparekraf, Sandiaga Uno berharap

bahwa melalui prestasi yang telah diraih, pengelola Desa Wisata dapat menjadi teladan bagi pengelola desa wisata lainnya serta berperan aktif dalam mendukung perkembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Gambar 1.1

Timeline Perkembangan Desa Wisata Lerep



Sumber: Pokdarwis Rukun Santoso Desa Wisata Lerep, 2024

Dalam proses pengembangan Desa Wisata Lerep hingga mampu dikatakan sebagai desa wisata yang berhasil, tak lepas dari peran pokdarwis dalam upaya pengelolaan desa wisata. Pada Desa Lerep, Pokdarwis baru dilakukan pada tahun 2017 dan masih perlu untuk dilakukan pembinaan dari berbagai unsur. Pokdarwis di Desa Lerep terdiri dari 3 yaitu Pokdarwis Rukun Santoso yang berada di Dusun Lerep, Pokdarwis Soka Ceria di Dusun Soka, serta Pokdarwis Indrokilo Mulyo di Dusun Indrokilo. Pada awal proyeksi perencanaan desa wisata, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang No. 556/0431/ 2015 Tahun 2015 tentang penetapan Desa Lerep menjadi desa wisata, Kepala Desa Lerep membuat pokdarwis dengan lingkup di tiap dusun. Yang terjadi di Pokdarwis Rukun Santoso yang pada awalnya hanya berfokus utama untuk mengelola serta

memanfaatkan potensi yang ada di Dusun Lerep saja, tetapi seiring berjalannya waktu, Pokdarwis Rukun Santoso secara tidak langsung ditunjuk menjadi pelaksana dari Desa Wisata Lerep dan dijadikan sebagai eksekutor yang dalam hal ini berperan dalam pelaksana, promosi hingga penerimaan tamu. Penunjukan Pokdarwis Rukun Santoso sebagai pelaksana dari desa wisata disebabkan karena Pokdarwis Rukun Santoso lebih aktif jika dibandingkan dengan dua pokdarwis lainnya, hal ini dilansir dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Ketua Pokdarwis Rukun Santoso, Daniel Bayu Anggara (wawancara tanggal 29/10/23). Bahkan jika Desa Wisata Lerep mengikuti suatu ajang perlombaan, yang menjadi pelaksana hanya Pokdarwis Rukun Santoso dan pokdarwis lainnya mengambil andil peran yang kecil seperti hanya mengirimkan produk asli dusun mereka ke dalam perlombaan tersebut.

Padahal jika dilihat secara potensi lokal yang ada di setiap dusun, Dusun Indrokilo dan Dusun Soka memiliki potensi lokal yang lebih unggul dibandingkan dengan Dusun Lerep. Pada Dusun Indrokilo sendiri terdapat potensi alam yang cukup menjanjikan berupa Curug Indrokilo, kebun kopi hingga olahan lokal setempat berupa gula aren. Lalu di Dusun Soka terdapat Kampung Iklim yang berfokus pada pengelolaan sampah. Sedangkan di Dusun Lerep sendiri sebenarnya tidak terdapat potensi lokal serupa dan pada akhirnya Dusun Lerep melakukan kerja sama dengan Karang Taruna dan kelompok wanita tani dan membentuk paket wisata yang berupa penjualan produk hingga wisata edukasi. Menurut Ketua Pokdarwis Rukun Santoso, Pokdarwis lain yaitu Pokdarwis Soka

Ceria dan Indrokilo Mulyo dapat dikatakan berada dalam tahap minim keterlibatan langsung dalam desa wisata. Pokdarwis selain Pokdarwis Rukun Santoso masih berada dalam kapasitas mengelola potensi dusun masing-masing, hingga belum mampu untuk menjadi pelaksana langsung dari desa wisata.

Dilansir dari website *Indonesianews.co.id* (6/6/2023), pada saat pelaksanaan pengembangan Desa Berdaya yang dilakukan oleh PLN berupa pengembangan infrastruktur jaringan internet, hanya dilakukan oleh Pokdarwis Rukun Santoso sebagai perwakilan dari Desa Lerep. Pokdarwis Rukun Santoso telah berhasil mewakili Desa Wisata Lerep dalam berbagai perlombaan, salah satunya dalam Lomba Konvensi Pokdarwis Tingkat Provinsi di DLAS Purbalingga 2019 dan berhasil menyabet juara umum. Lalu dilansir juga dari website *suaramerdeka.com* (29/7/2019), Pokdarwis Rukun Santoso berhasil memborong tiga gelar penghargaan dalam Jambore Pokdarwis Jawa Tengah 2019 dan berhasil mengalahkan berbagai pokdarwis dari daerah-daerah lain. Dilansir dari website *visitjawatengah.jatengprov.go.id* yaitu website resmi yang memberikan penjelasan tentang berbagai pariwisata di Provinsi Jawa Tengah terdapat bagian penjelasan tentang Desa Wisata Lerep dan dalam website hanya tertulis Pokdarwis Rukun Santoso saja yang dijadikan sebagai *contact person* yang memiliki peran agar masyarakat luas dapat menanyakan tentang informasi lebih lanjut dari Desa Wisata Lerep dan untuk keperluan reservasi. Dalam berbagai sumber yang menyebutkan tentang Desa Wisata Lerep baik yang menjelaskan tentang penghargaan yang diterima, sosialisasi yang dilakukan oleh

pihak dari luar, atau bahkan penjelasan umum tentang Desa Wisata Lerep, hanya menyebutkan satu pokdarwis saja yaitu Pokdarwis Rukun Santoso. Hal ini menjadi sedikit membingungkan disebabkan pada Desa Wisata Lerep terdapat tiga pokdarwis yang mewakili setiap dusun di Desa Lerep dan seharusnya memiliki peran yang sama.

Desa Wisata Lerep dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera berdasarkan Peraturan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat No 3 Tahun 2017 yang bekerja sama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Lerep dalam hal penyelenggaraan serta promosi paket wisata. Dalam proses pengelolaan, BUMDes Gerbang Lentera memiliki beberapa unit usaha seperti pengelolaan pariwisata, pengelolaan sampah, dan jasa catering. Pada unit pariwisata, BUMDes menjadikan pokdarwis sebagai mitra kerja dan sebagai pengurus resmi dalam desa wisata.

Penelitian ini berdasar pada beberapa studi literatur terdahulu dengan beberapa perbedaan yang mendasar sehingga menjadi pembeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Topik tentang desa wisata dan peran pokdarwis dalam peningkatan desa wisata memang bukanlah hal yang baru. Dari penelusuran penulis, setidaknya terdapat tiga fokus utama penulis dalam melakukan penelitian mengenai pokdarwis di Desa Wisata Lerep. Pertama, studi yang menyoroti tentang wisata di Padukuhan Bokesan yang dilakukan oleh Pokdarwis Bokesan. Dalam penelitiannya, Azimah & Damayanti (2019) menyoroti kendala yang dialami oleh Pokdarwis Bokesan yaitu terdapat di pemimpinnya belum mampu

untuk mengarahkan anggotanya dengan baik sehingga menyebabkan lemahnya komitmen dari tiap anggota dan timbul tumpang tindih peran dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, et al., (2021), menyoroti tentang permasalahan terbesar yang dihadapi dalam rangka pengembangan potensi desa adalah kurangnya sinergitas antara pemerintah desa, masyarakat desa, pelaku usaha dan BUMDes. Penyebab dari kurangnya sinergitas antar *stakeholder* ini adalah faktor dari minimnya kesadaran dan motivasi dari pengelola BUMDes serta manajemen pengelolaan yang dilakukan BUMDes cenderung lemah sehingga mengakibatkan kegiatan usaha yang dihasilkan BUMDes menjadi kurang inovatif dan sifatnya cenderung pasif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fiki, et.al (2021), memberikan gambaran tentang keberhasilan dari Pokdarwis Desa Bejo memahami potensi desa sehingga dapat menjalankan peran pemberdayaan masyarakat dan sukses menjadikan Desa Bejiharjo menjadi desa wisata. Beberapa penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran masyarakat dan sinergitas antar sektor di dalam pengelolaan pemerintahan desa dan pengoptimalan desa wisata merupakan suatu hal yang sangat penting.

Terdapat beberapa penelitian tentang Desa Lerep yang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi sejauh ini belum ada yang membahas tentang peran dari Pokdarwis dalam meningkatkan pemberdayaan dari masyarakat setempat, terutama yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Rukun Santoso sebagai pokdarwis yang lebih unggul dalam pemberdayaan masyarakatnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya tentang tiga Pokdarwis di Desa Wisata Lerep yang

memiliki fokus masing-masing dan mengacu pada penelitian terdahulu tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pengelolaan desa wisata. Pokdarwis Rukun Santoso yang seharusnya hanya mewakili Dusun Lerep sebagaimana kinerja pokdarwis lain yang hanya mewakili tiap dusun masing-masing tetapi berubah peran menjadi pokdarwis yang mewakili satu desa yaitu Desa Lerep serta keberhasilan dari Pokdarwis Rukun Santoso dalam menciptakan Desa Wisata Lerep menjadi desa wisata yang berhasil menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pokdarwis di Desa Wisata Lerep dalam mendorong pengembangan pariwisata?
2. Mengapa Pokdarwis Rukun Santoso mampu menjadi pokdarwis yang paling berhasil di Desa Wisata Lerep?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan fokus utama:

1. Untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pokdarwis di Desa Wisata Lerep dalam mendorong pengembangan pariwisata.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Pokdarwis Rukun Santoso menjadi yang paling dominan dalam pengembangan Desa Wisata Lerep.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan mengenai peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mengelola organisasi dan mengupayakan peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga dapat mengembangkan Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan inspirasi bagi pokdarwis di tempat lain agar dapat mengembangkan sektor pariwisata secara optimal.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memuat topik serupa sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dijadikan sebagai referensi ataupun pembanding dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu, penulis dapat memperoleh sudut pandang yang berbeda dan penelitian yang dilakukan tidak

terbatas pada argumentasi atau pandangan dari penulis sendiri. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan, dan dengan catatan bahwa penulis tidak dapat menemukan judul penelitian yang identik dengan penelitian ini.

Penelitian dengan topik desa wisata sudah menjadi hal yang umum, dan harus diakui jika studi mengenai Desa Wisata di Lerep bukan merupakan suatu hal yang baru. Dari penelusuran penulis, setidaknya terdapat beberapa fokus utama penulis dalam melakukan penelitian tentang Desa Wisata Lerep yang dalam hal ini akan lebih berfokus pada peran dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Fokus pertama yaitu pada penelitian yang berupaya untuk menjelaskan peran penting masyarakat dalam keberhasilan desa wisata. Keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan desa wisata yang berhasil, hal ini menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Susanawati et al., (2019); Andriyanto & Wihayati (2021); Rahmi et al., (2022); Naibaho et al., (2023); dan Murianto et al., (2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanawati et al., (2019) menyebutkan bahwa peran aktif masyarakat merupakan faktor penting dari keberjalanan pariwisata, dan Desa Wisata Lerep menjadi salah satu desa wisata percontohan di Jawa Tengah yang telah melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangannya. Keberhasilan pokdarwis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting karena dapat meningkatkan keinginan serta kesadaran masyarakat setempat untuk terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata (Andriyanto dan Wihayati, 2021). Sejalan dengan

beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa masyarakat memegang peranan penting untuk mengelola desa wisata karena pada dasarnya masyarakatlah yang lebih mengetahui tentang alam dan fenomena di sekitar (Rahmi et al., 2022). Pentingnya peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata menjadikan masyarakat yang berada dalam fase ketidakberdayaan seperti sulit mengubah pola pikir menjadikan keberhasilan desa wisata menjadi terhambat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan serta pengelolaan desa wisata dapat juga disebabkan karena latar belakang pendidikan masyarakat yang cenderung rendah serta pengelola pokdarwis yang masih memiliki pengalaman yang minim terutama dalam bidang manajemen dan pengelolaan (Naibaho, Nurcahyanto, dan Marom, 2023). Naihobo et al., (2023) menjelaskan bahwa pokdarwis dan masyarakat dihadapkan pada tantangan ketidakberdayaan dan berbagai hambatan yang perlu diatasi agar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar semakin mandiri di berbagai aspek. Selain itu, untuk memperkuat keberhasilan dari desa wisata, sangat penting untuk menjalin kerja sama yang baik antara pokdarwis dengan beberapa *stakeholder* terkait (Murianto et al., 2020).

Fokus lainnya yaitu menjelaskan tentang strategi yang dilakukan oleh pokdarwis dalam penguatan desa wisata, penelitian ini dilakukan oleh Purwanti (2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2019) menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh pokdarwis dalam proses penguatan desa wisata di Kampung Wisata Kungkuk adalah dengan melakukan promosi wisata salah satunya dengan melakukan publikasi, melakukan motivasi kepada

masyarakat sekitar dan dengan melakukan pembinaan untuk pengelolaan desa wisata.

Literatur-literatur di atas memiliki beberapa persamaan, yakni masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengembangan dan perwujudan desa wisata yang berhasil. Pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pokdarwis dalam melakukan pengembangan desa wisata (Susanawati et al., 2019). Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan nantinya akan membangkitkan keinginan serta kesadaran masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengembangan desa wisata. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya untuk mewujudkan keberhasilan pokdarwis dalam pengembangan desa wisata tidak dapat disamaratakan, karena keberhasilan ini terwujud dengan adanya pengembangan inovasi sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah dan menjadikan faktor lokalitas juga menjadi penentu dari perwujudan keberhasilan desa wisata. Beberapa celah yang belum terjawab dari penelitian-penelitian terdahulu terutama terkait faktor yang menjadikan pokdarwis berperan dalam menciptakan desa wisata yang berhasil dengan beberapa faktor pendukung serta penghambat yang dialami menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses perubahan baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan serta memperkuat kemampuan masyarakat yang dilakukan melalui proses pembelajaran bersama yang partisipatif dan terjadi perubahan perilaku pada setiap *stakeholder* yang terlibat dalam proses pembangunan dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif dan sejahtera secara berkelanjutan. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian dari pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*) (Mardikanto, 2017). Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau pemberian kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto, 2007 (dalam Wahyuni, 2018:87) menyebutkan bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Penyadaran

Tahap pertama adalah penyadaran dengan memberikan pemahaman kepada target yang hendak diberdayakan bahwasanya mereka memiliki suatu potensi dan perlu untuk mengembangkan potensi tersebut. Misalnya, jika targetnya adalah kelompok masyarakat miskin, mereka diberi penjelasan

bahwa mereka bisa menjadi lebih sejahtera jika memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan. Program-program pada tahap ini, seperti memberikan pengetahuan dan keyakinan. Prinsip utamanya adalah membuat mereka sadar bahwa mereka bisa membangun mimpi, diberdayakan, dan bahwa pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar. Proses dalam tahap penyadaran ini dilakukan dengan adanya usaha pendampingan atau fasilitator dengan tujuan untuk mencapai kemandirian sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap kedua adanya pengkapasitasan atau *capacity building* dengan memberikan daya atau kuasa kepada pihak yang hendak diberdayakan. Contohnya, sebelum memberikan otonomi kepada daerah-daerah, seharusnya daerah-daerah tersebut diberikan program pelatihan agar mereka mampu mengelola otonomi tersebut dengan baik. Pengembangan kapasitas organisasi dilakukan melalui restrukturisasi agar daerah mampu melaksanakan otonomi dengan benar, karena masalah sering muncul akibat kurangnya kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi. Dalam pemberdayaan masyarakat di desa wisata, pihak yang memberdayakan dapat memberikan penyuluhan, pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat sekitar.

3. Tahap Pendayaan

Tahap terakhir adalah dengan memberikan daya atau kekuasaan sesuai dengan kecakapan penerima yang dilakukan melalui partisipasi aktif serta

berkelanjutan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan pemberian peran yang semakin besar dan bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dari penerima. Aspirasi masyarakat diakomodasi serta dibimbing untuk melakukan evaluasi diri (self evaluation) terhadap pilihan serta hasil dari pelaksanaan pilihan tersebut

Implementasi/ Pelaksanaan Alur Tahapan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 yang dianalisis sesuai dengan teori delivery tentang Tahapan Pemberdayaan yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2013). Dalam teori delivery ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. Seleksi Lokasi atau Wilayah

Seleksi lokasi dengan melakukan seleksi terhadap wilayah dan dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dan masyarakat.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Tahap ini dilakukan dengan melakukan komunikasi untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat. Tujuan sosialisasi ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak lainnya terkait dengan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Dalam tahap ini dapat menjadikan masyarakat tertarik untuk berperan aktif dan terlibat dalam program.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Tahap bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam proses ini, masyarakat secara bersama-sama melakukan beberapa hal. Pertama, melakukan kajian keadaan pedesaan secara partisipatif. Selanjutnya, mengembangkan kelompok-kelompok untuk bekerja sama. Kemudian, menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif untuk memastikan program berjalan dengan baik.

4. Pemandirian Masyarakat

Lalu tahap terakhir yaitu proses pemandirian masyarakat yang diimplementasikan dengan melakukan pendampingan yang bertujuan agar masyarakat mampu mengelola kegiatannya secara mandiri.

Selain itu, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardikanto (2013:188) bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Sumber daya alam
2. Sumber daya manusia
3. Keadaan kelembagaan
4. Sarana dan prasarana
5. Kebijakan
6. Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat

Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah banyak yang belum berjalan dengan baik walaupun sudah banyak kebijakan yang

berusaha untuk memperbaiki hal ini. Hambatan bagi perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintah daerah terletak pada masyarakat daerahnya sendiri. Hal ini dapat berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta dapat juga disebabkan oleh lemahnya organisasi kemasyarakatan setempat (Muluk, 2007). Partisipasi dapat diartikan sebagai kesediaan masyarakat untuk ikut serta dalam program pembangunan tanpa ada paksaan. Masyarakat lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dari desa wisata karena potensi lokal serta dan tradisi budaya menjadi hal yang sudah melekat pada masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam desa wisata (Dewi, 2013).

1.7. Operasional Konsep

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi desa. Pemberdayaan tersebut dilihat dari tiga tahapan, yakni :

- a. Tahapan Penyadaran, yakni tahap penyadaran akan potensi wisata, dan dapat dilihat melalui aspek:
 - 1) Sosialisasi tentang desa wisata
 - 2) Respon masyarakat berkaitan dengan program desa wisata
 - 3) Pelibatan masyarakat dalam program Desa Wisata Lerep

- b. Tahapan Pengkapasitaan, yakni merupakan tahap yang mengarahkan kapasitas berupa keterampilan dan pelatihan dengan tujuan agar masyarakat Desa Lerep semakin mampu untuk menjalankan dan meningkatkan potensi yang dimiliki. Tahap pengkapasitan atau *capacity building* ini dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:
 - 1) Pemberian daya yang dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan.
 - 2) Partisipasi masyarakat dalam pelathan pemberdayaan.
 - c. Pendayaan, yaitu tahapan memberikan daya dan peluang sesuai kualitas dan kemampuan yang miliki oleh masyarakat Desa Wisata Lerep, dan dalam tahapan ini dilihat melalui aspek sebagai berikut:
 - 1) Kecakapan masyarakat Desa Wisata Lerep
 - 2) Bantuan modal dana dalam Desa Wisata Lerep
 - 3) Evaluasi dari masyarakat tentang Desa Wisata Lerep
2. Faktor pendorong dan penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk pengembangan parwisata di Desa Wisata Lerep dilihat dari beberapa aspek, yakni:
- a. Sumber daya alam
 - 1) Adanya potensi sumber daya alam di Desa Wisata Lerep
 - 2) Manajemen pengembangan potensi sumber daya alam
 - b. Sumber daya manusia
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
 - 2) Partisipasi serta inovasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata

c. Keadaan kelembagaan

- 1) Terjalannya komunikasi antara pihak pemerintah dengan pengelola desa wisata
- 2) Adanya bantuan dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata

d. Sarana dan prasarana

- 1) Terdapatnya sarana dan prasarana terkait pemberdayaan masyarakat
- 2) Munculnya inovasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana

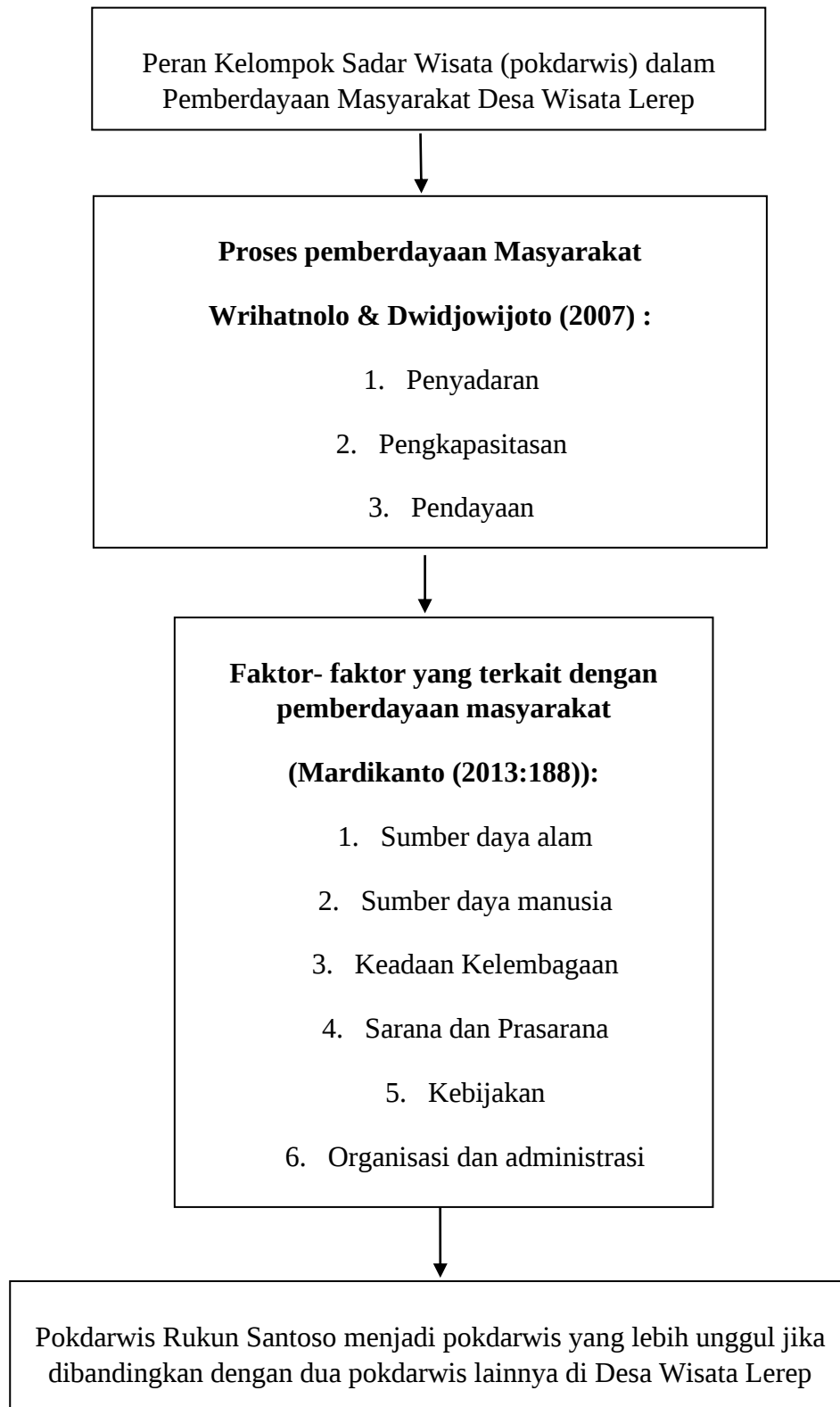
e. Kebijakan

- 1) Adanya kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat
- 2) Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut

f. Organisasi dan Administrasi

- 1) Kondisi organisasi yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Lerep
- 2) Peran dan fungsi masing-masing organisasi dalam mendukung pengembangan desa wisata
- 3) Tantangan yang dihadapi organisasi dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat

1.8. Kerangka Berpikir



1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang mana Creswell J. W (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendefinisikan tentang suatu pendekatan atau penelusuran yang bertujuan untuk memahami serta mengeksplorasi gejala sentral dengan melakukan wawancara kepada partisipan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan umum dan kemudian informasi tersebut dikumpulkan, dianalisis lalu diinterpretasikan lebih dalam. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan keakuratan serta keasliannya.

Metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang merupakan suatu strategi kualitatif yang mana peneliti melakukan kajian terhadap sebuah aktivitas, kejadian proses dan atau salah satu lebih individu yang dilakukan dengan lebih mendalam. Kasus-kasus yang dilakukan penelitian tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas sehingga peneliti perlu untuk mengumpulkan informasi secara detail dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data dalam periode waktu tertentu (Creswell J. W., 2017).

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini terletak di Desa Lerep, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi Desa Lerep karena

penelitian ini berfokus pada Desa Lerep yang dapat dikatakan sebagai desa wisata berhasil di Kabupaten Semarang salah satu alasannya karena telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai desa berkelanjutan. Keberhasilan ini tak lepas dari peran dari beberapa *stakeholder* salah satunya adalah peran dari ketiga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek yang dimaksud dari penelitian ini adalah beberapa informan yang dapat menjawab rumusan masalah yaitu Perangkat Pemerintah Desa Lerep serta ketua, pengurus serta anggota dari masing-masing pokdarwis di Desa Wisata Lerep yang turut ikut serta dalam terwujudnya keberhasilan dari Desa Wisata Lerep.

1.9.4. Penentuan Informan

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini adalah *purpose sampling*. Teknik *purpose sampling* adalah penentuan informan yang dijadikan sebagai sumber data dengan melalui pertimbangan tertentu, misalnya informan tersebut dianggap sebagai yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiono, 2009). Informan yang dipilih ini akan menjadi seorang informan yang benar-benar memahami tentang hal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu sampel yang akan dijadikan sebagai informasi untuk informan memiliki kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk menemukan keakuratan data, yaitu:

1. Perangkat Pemerintahan Desa Lerep
2. Ketua atau anggota Pokdarwis Rukun Santoso
3. Ketua atau anggota Pokdarwis Soka Ceria
4. Ketua atau anggota Pokdarwis Indrokilo Mulyo

1.9.5. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data primer

Klasifikasi data kunci yang meliputi hasil dari wawancara dengan pemberi informasi yang dijelaskan dalam topik penelitian. Sumber data primer berasal dari data hasil wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari data yang berasal dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan melalui internet seperti jurnal penelitian yang memiliki kaitan dengan keberhasilan pokdarwis di desa wisata serta berasal dari buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sehingga mempermudah proses penyusunan dan pembuatan laporan penelitian ini.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah dalam mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan melalui studi tinjau dan wawancara, baik yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak, melalui dokumentasi dan usaha untuk merekam atau mencatat informasi (Cresswell J. W., 2016). Selain itu,

Cresswel (2016) juga menyebutkan beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengumpulan data, yaitu:

1. Mengidentifikasi beberapa individu atau lokasi terkait dengan proposal penelitian.
2. Menjelaskan jenis-jenis data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen (dokumentasi)
3. Menentukan jenis atau strategi yang akan digunakan menurut kajian kelebihan serta kelemahan masing-masing strategi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian terkait dengan hal-hal yang ingin diteliti. Wawancara dilakukan dengan melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui peran dan hambatan yang dilalui oleh Pokdarwis Rukun Santoso dalam mendorong keberhasilan Desa Wisata Lerep. Sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat data-data yang telah ditemukan sebelumnya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen kualitatif, baik yang bersifat publik maupun privat. Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto atau gambar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data merujuk pada usaha peneliti untuk memberi makna secara menyeluruh terhadap berbagai jenis data seperti teks atau gambar. Data kualitatif merupakan rangkaian data yang diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen dan dokumentasi. Informasi yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk menemukan temuan utama dalam penelitian. Tujuan dari dilakukannya analisis data dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles yang meliputi tiga hal, yaitu (Hardani, 2020):

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap analisis data yang berguna untuk mengidentifikasi, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang didapat di lapangan dan memfokuskan pada hal-hal penting. Tahap reduksi data ini bertujuan untuk menyederhanakan serta mengubah data kualitatif menjadi catatan-catatan yang lebih terfokus melalui proses seleksi yang cermat. Peneliti akan mereduksi data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data baik dari data primer maupun sekunder.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan dari berbagai informasi yang telah didapat. Dalam penelitian kuantitatif biasanya penyajian data dilakukan melalui teks yang

bersifat naratif. Tahap penyajian data ini dilakukan agar lebih memudahkan peneliti untuk memahami data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan data terkait dengan kinerja dari pokdarwis-pokdarwis di Desa Wisata Lerep terhadap peran dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan faktor serta penghambat apa saja yang telah didaluinya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan harus didukung oleh data atau bukti yang valid. Kesimpulan merupakan inti atau pokok bahasan dari temuan penelitian yang telah dilakukan, dan dalam hal ini biasanya juga terdapat pandangan atau pendapat dari peneliti. Penarikan kesimpulan harus selaras dengan fokus serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya untuk menarik kesimpulan dari peran yang telah dilakukan oleh pokdarwis-pokdarwis di Desa Wisata Lerep dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap keberhasilan Desa Wisata Lerep dan menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan tiap pokdarwisnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

1.9.8. Validasi Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta dengan studi pustaka yang didukung dengan beberapa informasi yang terkait dengan topik penelitian dan diperoleh dari para informan yang dibutuhkan. Cresswell (2016) mengungkapkan bahwa dalam

penelitian kualitatif, analisis data dapat diartikan sebagai usaha peneliti untuk memaknai data yang dilakukan secara menyeluruh, dan data-data tersebut merupakan data yang dapat berupa teks atau gambar. Berdasarkan Cresswell (2016), terdapat delapan strategi validasi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Mentrangulasi (*triangulate*) data dari berbagai sumber dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang berasal dari berbagai sumber tersebut dan kemudian digunakan untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.
2. Menerapkan *member checking* untuk memastikan akurasi hasil penelitian
3. Membuat deskripsi yang detail atau deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) mengenai hasil penelitian.
4. Mengklarifikasikan kemungkinan bias yang dapat memengaruhi penelitian.
5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “*negative*” (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan suatu pertentangan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*) di lapangan atau lokasi penelitian.
7. Melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti (*peer debriefing*) untuk meningkatkan keakuratan dari hasil penelitian.
8. Melibatkan para auditor (*external auditor*) untuk ikut meninjau keseluruhan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi validitas triangulate, yaitu mencari kebenaran dari suatu data atau informasi yang berasal dari

berbagai sumber dan metode yang beragam, seperti melalui wawancara dan dokumentasi.